



Dampak Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah

Nursaptini Nursaptini^{1*}, Suyanto Suyanto²

¹ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram.
Jalan Majapahit No. 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115, Indonesia.

² Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
Jalan Colombo No. 1, Karang Malang, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia.

nursaptini@unram.ac.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article History

Received:

26 June 2016

Revised:

17 September 2019;

Accepted:

22 October 2019

Keywords

Bantuan Operasional Sekolah;
Kemandirian;
Madrasah Swasta;
School operation assistance;
Self reliance;
Private madrasah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap tantangan kemandirian Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin Praya dan Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihadiyah Nahdlatul Wathan (NW) Sepakat Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Subyek penelitian adalah pengelola yayasan, kepala madrasah, guru, bendahara BOS, komite madrasah, orangtua siswa, siswa dan Tim Manajemen BOS Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengadaptasi Model Spiral Analisis yang dikembangkan Creswell meliputi mengorganisasikan data, membaca dan membuat memo, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data menjadi kode dan tema, menafsirkan data, menyajikan data, dan memvisualisasikan data. Hasil penelitian ini adalah pada awal berdirinya madrasah merupakan institusi pendidikan yang tumbuh dan berkembang dari dan oleh masyarakat. Segala kebutuhan madrasah berasal dari masyarakat mulai dari biaya pembangunan gedung, biaya operasional dan lainnya berasal dari swadaya masyarakat. Namun keadaan berbeda setelah adanya BOS. Bantuan Operasional Sekolah dijadikan sumber utama pemenuhan biaya nonpersonalia madrasah, tidak ada usaha dari pengelola madrasah dalam mendapatkan tambahan biaya nonpersonalia. Hal ini menyebabkan segala aktivitas pembelajaran dapat berjalan apabila dana BOS dicairkan.

This study aims to reveal the impact of School Operational Assistance (SOA) on the challenge of independence of Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin Praya and Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihadiyah Nahdlatul Wathan (NW) Sepakat. The approach used in this study is a qualitative case study. The research subject the foundation managers, headmasters, teachers, treasurers SOA, school committee, parents, student, SOA management team in the central Lombok Ministry of Religion. The data were collected through observation, interviews and documentation. The data analysis was carried out by adapting the Spiral Model of analysis developed by Creswell including organizing data, reading and creating memo, describing, classifying, and interpreting the data into code and themes, interpreting data, presenting data and visualizing data. The results of this study are at the beginning of the establishment of the madrasa was an educational institution that grew and developed from and by the community. But the situation is different after the SOA. School Operational Assistance is used as the main source of madrasa nonpersonal cost. There is no effort from the madrasa manager to obtain additional nonpersonal cost. This causes all learning activities to run if the SOA funds are disbursed.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, p. 9). Hal-hal yang termasuk ke dalam standar biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah, biaya bahan dan alat habis pakai, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa atau ekstrakurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, No. 69 Tahun 2009). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan dasar (SD dan SMP) atau satuan pendidikan lain sederajat yang bermutu bagi seluruh peserta didik (Novelsyah & Sudibyo, 2011, pp. 1-5; Kharisma, 2013, p. 8; Supriyadi, 2016, pp. 79-80). Peningkatan pendidikan dasar memiliki peran penting dalam daya saing bangsa yang berkelanjutan (Sulisworo, 2016, p. 136; Ferdi, 2013, p. 556). Pada dasarnya program Bantuan Operasional Sekolah merupakan pengembangan lebih lanjut dari program Jaring Pengaman Sosial bidang pendidikan, yang dilaksanakan pemerintah kurun 1998-2003, dan program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM yang dilaksanakan kurun 2003-2005 (Suhardi & Hadiyanto, 2012, p. 2; Saptari, 2015).

Bantuan Operasional Sekolah secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. (Permendikbud RI No 161 Tahun 2014). Bantuan Operasional Sekolah sebagai bentuk realisasi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini kemudian dijabarkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Program Bantuan Operasional Sekolah hadir sebagai salah satu bentuk penjaminan pemerintah terhadap pengaksesan pendidikan untuk semua yang berada di bawah payung hukum yang kuat sebagai input kebijakan untuk mengatur pendidikan (Putra, 2016, p. 32; Yudhanti, 2012, p. 14). Hal ini menjadi pedoman guna mengatasi masalah yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan. Kebijakan pendidikan akan dilaksanakan oleh sekolah, bagus tidaknya implementasi kebijakan pendidikan di sekolah ditentukan oleh kepala sekolah dalam pengelolaan dan sumber daya sekolah (Muhammadi, Chairil, & Yahya, 2015, p. 141; Purnama, pp. 28-29; Setiyati, 2014, p. 201).

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Madrasah, dewan guru dan komite sekolah (Dit. PI Kementerian Agama, 2015, p. 15). Namun realita yang terjadi seperti hasil penelitian Yuliana, Widayati, dan Taufiq (2015, p. 14) bahwa orang tua yang diwakilkan melalui komite sekolah tidak mengetahui penggunaan dana BOS sehingga orangtua siswa menganggap tidak perlu membayar keperluan pendidikan anaknya seperti buku dan seragam sekolah. Hal ini terjadi karena Bantuan operasional sekolah diidentikkan dengan pendidikan gratis. Padahal menurut Ismanto (2014, p. 465) BOS tidak dapat memenuhi semua biaya operasional sekolah sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk membantu. Orangtua siswa melalui komite sekolah diberikan ruang untuk melakukan pengawasan dan terlibat langsung di dalam pengelolaan dana BOS sehingga seharusnya mengetahui kegunaan BOS tidak menyerahkan semua biaya pendidikan kepada dana BOS (Jack, 2015, p. 86; Sulfiati, Alam, & Irwan, 2010, p. 116). Banyak orang tua dan masyarakat tidak sepenuhnya menyadari manfaat program BOS dan peluang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di sekolah dan untuk memantau penggunaan dana BOS. Pelaksanaan anggaran sekolah seharusnya melibatkan seluruh *stakeholders* seperti kepala sekolah melibatkan guru, karyawan dan orangtua. Setiap tim diberi otonomi dalam melaksanakan kegiatan, peran yang lain adalah mengawasi dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan kesepakatan bersama. Bahkan pelatihan bagi komite sekolah tentang penggunaan dana BOS sangat diperlukan (Rahayu, Ludigdo, Irianto, & Nurkholis, 2015, p. 17; Widyatmoko, & Suyatmini, 2017, p. 156).

Bantuan Operasional sekolah yang diterima oleh madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa (Dit. PI Kementerian Agama, 2015, p. 2), sehingga sekolah yang memiliki siswa lebih banyak akan mendapatkan dana lebih besar. Dalam dunia sekolah ada beberapa unit pendidikan yang difavoritkan masyarakat dan unggulan tentunya sekolah yang seperti ini akan mendapatkan siswa yang banyak dan sebaliknya terjadi pada sekolah/madrasah swasta yang mutunya biasa saja akan sulit mendapatkan siswa dan dana BOS yang didapatkan juga sedikit. Penyaluran dana BOS dengan sistem rasio siswa ini dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam mutu pendidikan. Subsidi dana pendidikan salah satunya melalui program Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dijelaskan Mitchell, Crowson, dan Shipps (2011, p. 94) merupakan sebagai *control* negara sebagai dana tambahan. Bantuan Operasional Sekolah tidak hanya diberikan untuk sekolah negeri akan tetapi sekolah-sekolah swasta/madrasah swasta yang sudah mendapatkan izin operasional juga mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah. Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah membantu sekolah terutama dalam hal biaya operasional lebih khusus pada Madrasah Swasta. Pada sisi lain dengan mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah madrasah swasta kurang memiliki inisiatif untuk mencari sumber pendanaan operasional lainnya. Sekolah hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah sebagai sumber pembiayaan operasional sekolah yang utama (wawancara dengan salah seorang kepala madrasah pada Juli, 2015). Hal ini berbanding terbalik dengan awal kemunculan madrasah swasta yang mandiri. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih detail tentang Dampak Bantuan Operasional Sekolah terhadap tantangan kemandirian MTs Nurul Yaqin Praya dan MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat Lombok Tengah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Menurut Creswell (2014, p. 135) penelitian kualitatif studi kasus (*case study*) merupakan penelitian yang mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem temporer melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi dan melaporkan deskripsi kasus. Pendekatan penelitian ini dipilih karena bukan bertujuan menguji hipotesis tetapi bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam terhadap suatu data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mengungkapkan sesuatu dibalik atau fenomena sosial yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini yakni peneliti mengungkapkan dampak Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurul Yaqin Praya dan MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat Lombok Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di MTs Nurul Yaqin Praya dan MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat Lombok Tengah. Selanjutnya, waktu penelitian berlangsung mulai bulan Januari 2016 sampai Maret 2016.

Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola yayasan, kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, orangtua siswa, siswa MTs Nurul Yaqin Praya dan MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat, dan Tim Manajemen BOS di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Metode penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pememilihan sampel berdasarkan penilaian subjektif tentang unit analisis yang paling representatif dengan masalah yang dikaji (Rubin & Babbie, 2009, p. 148). Selanjutnya, untuk teknik pengambilan sampling yang digunakan yaitu *snowball sampling*, teknik ini mengimplikasikan jumlah sampel semakin membesar seiring dengan perjalanan waktu pengamatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti memilih menggunakan observasi *non partisipan*. Observasi *non partisipan* yaitu observasi yang observer atau peneliti tidak ikut ambil bagian dalam situasi atau keadaan yang akan diobservasinya.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan *interview* atau wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori *deep interview* di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Salah satu alasan utama menggunakan wawancara semi terstruktur adalah peneliti diberikan kebebasan dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan *setting* wawancara. Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dengan dokumentasi. Pemilihan teknik ini sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara agar lebih dapat dipercaya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini seperti

Profil Kabupaten Lombok Tengah, Profil Madrasah, Profil Yayasan, buku laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dokumen tentang kesiswaan, data dari Badan Pusat Statistik, data dari Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, data tersimpan di website, dan lain-lain, yang terkait dengan dampak Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurul Yaqin Praya dan MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat, guna memperkaya data-data yang relevan dengan pokok kajian penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan model Spiral Analisis yang dikembangkan Cresswell yang meliputi mengorganisasikan data, membaca dan membuat memo, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data menjadi kode dan tema, menafsirkan data, menyajikan dan memvisualisasikan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Madrasah di Lombok Tengah sebagian besar berstatus madrasah swasta termasuk MTs Nurul Yaqin Praya. MTs Nurul Yaqin Praya sangat kuat terhadap perubahan, baik perubahan regulasi dari pemerintah maupun menghadapi perubahan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perjalanan madrasah telah mengalami perjalanan panjang untuk pengakuannya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, mulai dari lahirnya UU No. 4 tahun 1950, SKB 3 Menteri, di susul Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 dan terakhir Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

Berdirinya MTs Nurul Yaqin Praya tidak lepas dari semangat *fastabiqul khairot* pendirinya yang ingin memajukan masyarakat sekitarnya melalui bidang pendidikan. Pada awal berdirinya madrasah sumber pembiayaan operasional madrasah dari swadaya masyarakat, dan untuk yang formal melalui SPP sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang informan di MTs Nurul Yaqin Praya bahwa

MTs Nurul Yaqin yang paling dulu berdiri di Pondok Pesantren ini cikal bakalnya menurut sejarah pada tahun 1943 namun izin operasionalnya diresmikan tahun 1981 bisa dikatakan yang paling awal di Lombok Tengah, jadi mulai dari segala kebutuhannya ya mandiri dulu dari swadaya masyarakat.

Hasil wawancara tersebut didukung dengan temuan analisis dokumen akta pendirian Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yaqin Praya Nomor 02 Tanggal 15 Januari 2016 yang sudah diperbaharui bahwa yayasan Pondok Pesantren Nurul Yaqin Praya didirikan tanggal 28 Rabiul Awwal 1363 H dan/atau dua Juni tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga (1943). Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen ini diketahui bahwa MTs Nurul Yaqin Praya merupakan madrasah yang pertama berdiri di Lombok Tengah. Madrasah ini sudah berdiri lebih dari setengah abad yang tentunya kalau dilihat dari segi pemenuhan biaya operasional keseharian madrasah, sudah mengalami banyak perjuangan untuk memenuhinya dengan menghadapi kondisi masyarakat yang pada saat merintis masih dalam proses perjuangan menuju kemerdekaan NKRI, sehingga bertahannya sebuah madrasah sangatlah sulit, walaupun begitu MTs Nurul Yaqin Praya masih beroperasi sampai sekarang. Hal ini menunjukkan ada kemandirian di tubuh Madrasah yang ditunjukkan dengan tidak menggantungkan diri kepada orang lain, sehingga madrasah sebagai sebuah komunitas, tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan atas kemampuan sendiri (Solichin, 2012, p. 202). Kemandirian sebuah lembaga pendidikan termasuk madrasah berdasarkan hasil penelitian Alma dan Hurriyati (2008) didukung oleh salah satunya melalui swadana artinya pendanaan dapat melalui patungan, zakat, infak, sadaqoh, nazar, titipan, dan loan dari anggota penyelenggara (pimpinan, dan tenaga kependidikan), peserta didik, dan alumni.

Perubahan peraturan tentang madrasah tidak membuat MTs Nurul Yaqin Praya punah ditelan zaman, namun sebaliknya bisa beroperasi sampai sekarang. Kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah tentunya tidak lepas dari kemandirian suatu lembaga pendidikan. Proses pemenuhan biaya operasional keseharian madrasah berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah seperti yang dijelaskan informan yang lain bahwa:

Kalau dulu sebelum ada BOS ini ya pihak sekolah memungut biaya SPP dari orangtua siswa tetapi tidak banyak sekitar Rp 10.000 pokoknya sedikit tidak terlalu membebani.

Hal ini menunjukkan semangat pengurus madrasah sangat tinggi agar semua anak bisa mengenyam pendidikan dengan tidak membebankan biaya SPP yang tinggi. Setelah ada BOS SPP yang dikeluarkan wali murid dihilangkan sebagaimana hasil wawancara dengan kepala madrasah pengurus yayasan, dan wakil kepala sarana bahwa:

Setelah ada BOS ini ya biaya operasional sekolah kita anggarkan dari sana, tidak ada sumber lain, nah kalau misalnya kita ada kebutuhan yang melebihi dari anggaran BOS ya kita melapor ke yayasan.

Yaa sebelum ada BOS itu kan rata-rata sekolah itu apalagi yang swasta untuk biaya operasional kesehariannya dari masyarakat, untuk membuat gedung juga dari sadaqah masyarakat, nah sekarang alhamdulillah dengan adanya BOS orangtua siswa tidak perlu membayar sudah ditanggulangi oleh BOS itu.

Orangtua siswa sangat terbantu dengan adanya BOS ini karena zaman dulu sebelum ada BOS mereka harus membayar SPP, kalau sekarang kan tidak ada yang dibayar, paling cuman beli baju seragam sudah sekolah sampai selesai sudah itu saja tidak ada bayar-bayaran lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan tersebut menunjukkan bahwa sebelum ada BOS untuk biaya operasional madrasah itu ditanggung oleh masyarakat dan setelah ada BOS sepertinya tanggung jawab masyarakat sudah diambil alih, di mana orangtua siswa cukup memberikan pakaian seragam. Hasil temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah seorang siswa bahwa:

Kalau tingkat MTs kaa tidak ad yang dibayar kan sudah ditanggung oleh BOS, LKS saja yang dibayar di sekolah harganya Rp 5000, dan fotokopian sekitar Rp 7500 itu saja.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa biaya operasi nonpersonalia madrasah murni dari BOS. Bantuan Operasional Sekolah telah memberikan perubahan bagi sekolah sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang guru bahwa:

Setelah ada BOS perpustakaannya ada, koperasi ada kita buat, ada alat pengeras suara, kemudian alat olahraga sudah lengkap, Bola Lembing, Matras dan lain-lain sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan di atas menjelaskan bahwa dengan adanya BOS banyak hal yang sudah dilakukan oleh Madrasah seperti adanya perpustakaan, kelengkapan olahraga serta ada untuk pemeliharaan gedung. Temuan ini diperkuat dengan data observasi pada tanggal 14 Januari 2016 pukul 09.30 bahwa peneliti melihat kelengkapan buku-buku di perpustakaan mulai dari buku-buku pelajaran, buku referensi, peta, globe dan dalam perpustakaan juga menyediakan ruang baca, dan ruang perpustakaan yang sewaktu-waktu bisa digunakan sebagai tempat belajar mengajar. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah menunjang kelengkapan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran dan memberikan keringanan bagi orangtua siswa karena membantu dalam biaya pendidikan anak. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan bendahara BOS bahwa:

Kita di MTs ini untuk biaya operasional hanya murni dari BOS, karena dana BOS ini murni untuk operasional sekolah jadi susah juga untuk kita kembangkan ke yang lain. Kan donatur dari luar juga, dari pihak wali murid malah mereka mau dikasih, 90% siswa disini mengatakan diri tidak mampu.

Dana BOS dijadikan sumber utama pembiayaan operasi nonpersonalia sekolah. Selain itu sekolah merasa segan untuk meminta tambahan pembiayaan pendidikan dari wali murid karena wali murid mengaku kurang mampu malahan mau diberi. Padahal berdasarkan hasil observasi ditemukan rumah wali murid permanen, anak-anaknya memiliki kamar tidur sendiri, memiliki perabot rumah tangga yang lengkap. Hal ini menunjukkan berdasarkan hasil penelitian Bhawa, Haris, & Made

Artana (2014, p. 10) menunjukkan kurangnya pemahaman komite atau orangtua siswa dalam penggunaan BOS mereka menganggap dengan adanya BOS semua pembiayaan pendidikan sudah terpenuhi. Padahal dalam undang-undang dijelaskan bahwa tanggung jawab masyarakat, orang tua/wali peserta didik bertanggung jawab atas biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan sebagainya (Suhardi & Hadiyanto, 2012, p. 116). Bantuan Operasional Sekolah sebagai dana subsidi diidentikkan oleh masyarakat sebagai sekolah gratis hal ini tentunya menimbulkan beberapa kerugian sebagaimana yang dijelaskan Nata (2013, p. 255) bahwa: 1.) Telah menurunkan partisipasi dan tanggungjawab masyarakat dalam pendidikan; 2.) Menurunkan gairah para pengelola satuan pendidikan; dan 3) menimbulkan dampak psikologis yang cukup berat bagi pengelola pendidikan non pemerintah (swasta). Sekolah swasta yang mutunya biasa-biasa saja merasakan beban yang cukup berat untuk kelangsungan operasional sekolah.

BOS dijadikan sumber pembiayaan operasional yang utama berdasarkan hasil analisis dokumen pada RKAM BOS bahwa memang tidak ada sumber pembiayaan operasional selain dari BOS. Dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat dijadikan tumpuan utama sedangkan bantuan dari pemerintah daerah setempat tidak ada. Keadaan ini diperkuat berdasarkan observasi selama berada di MTs Nurul Yaqin Praya ketika mendengar pembicaraan guru-guru selalu kalau ada yang mau dibeli untuk perlengkapan sekolah itu dari BOS seperti pembelian bendera yang dipakai Apel, pembelian pengeras suara, yang digunakan untuk kegiatan berdo'a setiap pagi semuanya dibeli dari dana BOS. Padahal menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2012, p. 20). Anggaran sekolah bisa berasal dari berbagai sumber termasuk pemerintah orangtua siswa, dermawan, sumbangan, dan sponsor.

Kemudian terkait dengan keterlibatan yayasan dalam pembiayaan operasional sekolah keseharian madrasah dengan adanya BOS sepertinya tanggung jawabnya berkurang sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang guru bahwa:

Sebelum ada BOS seperti yang dikatakan bapak ketua yayasan, bahwa selain dari SPP siswa, yayasan juga menanggung biaya operasional sampai 3 jutaan setiap bulan. Nah sekarang biaya operasional semuanya sudah dianggarkan dari BOS jadi jarang kita meminta kalau memang mendadak dan tidak dianggarkan dari BOS baru kita melapor.

Sebelum ada BOS yang menanggung biaya operasional keseharian madrasah dari yayasan. Namun setelah BOS ada, jarang dilakukan karena semua kebutuhan sudah dianggarkan dari BOS, dan terkait dengan sumber kekayaan yayasan dalam pembiayaan operasional sekolah diungkapkan oleh salah seorang pengurus yayasan bahwa:

Setau saya akibat dari perpisahan yang hubungannya dengan pendiri pondok pesantren Muhajirin sehingga kekayaan itu akhirnya ke Muhajirin na kita memang secara pribadi yayasan ini punya, akan tetapi tidak terlalu banyak jadi yayasan biasanya untuk mengasap dapur menghidupkan suasana pondok itu dari sana. Untuk kegiatan formal yayasan selama ini mendapatkan bantuan dari pemerintah dan donator yang tidak terikat.

MTs Nurul Yaqin Praya dalam hal untuk memenuhi biaya operasional lebih banyak mengandalkan dari donator yang tidak terikat dan dari pemerintah karena tidak memiliki sumber kekayaan pribadi. Otonomi sekolah diharapkan agar ada peningkatan efisiensi (Yi, 2015, p. 216) dan kemandirian dianggap sebagai prinsip yang mendasar bagi reformasi pendidikan. Namun yang terjadi sebaliknya adanya Bantuan Operasional Sekolah menjadi sebuah tantangan dalam kemandirian madrasah hal ini disebabkan madrasah tidak memiliki sumber kekayaan yang khusus untuk membiayai operasional sekolah seperti unit usaha mandiri. Tidak ada inovasi atau usaha untuk memberdayakan masyarakat agar mendapatkan tambahan biaya operasi nonpersonalia sekolah.

Keadaan yang tidak jauh berbeda juga terjadi di MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat bahwa semangat mendirikan madrasah sangat tinggi dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Pada saat awal pendirian madrasah, pengelola madrasah mengajak masyarakat untuk membangun mulai dari gedung dan segala kebutuhan madrasah dari swadaya masyarakat.

Karena kondisi masyarakat sehingga ya belajarnya di bawah pohon asam kemudian berikutnya lebih maju lagi menggunakan atap jerami, nah ditempat kita duduk inilah dulu tempat madrasahny sebelum pindah ke tempat yang sekarang dan pembiayaan waktu dulu ya swadaya masyarakat, yaa dulu dari internal keluarga dulu. Ada juga sumbangan dalam bentuk I'anah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun namanya jadi setiap panen sesuai dengan kondisi masyarakat tidak dipatok, sesuai kemampuan kadang-kadang ada yang 10 kilo gabah, ada yang 15 kilo tergantung situasi na waktu tahun 1989 kita lihat ada kemajuan ekonomi sehingga kita menarik SPP dari masyarakat dan di samping itu tetap setiap 1 (satu) tahun I'anah.

Melalui niat yang tulus dan ikhlas pendiri Madrasah Al-Ittihadiyah ingin membangun masyarakat sekitar dengan menegakkan madrasah walaupun pada saat itu, ekonomi masyarakat tergolong miskin. Kebanyakan madrasah lahir dan berkembang bersama masyarakat (Rosyada, 2017, p. 21). Keluarga pendiri madrasah Al-Ittihadiyah rela mengeluarkan kekayaan pribadi untuk membangun madrasah. Keadaan berubah seiring perubahan ekonomi masyarakat sehingga mulai terstruktur pembiayaan operasional madrasah dengan sistem SPP. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan yang lain bahwa:

“di Madrasah Al-Ittihadiyah ini tetap walaupun sekarang ada BOS meminta orangtua wali murid untuk menyerahkan I'anah berupa gabah setiap siswa. Kalau dikaitkan dengan konsep agama itu sebagai mahar dari murid ke gurunya yang dimaksudkan sebagai kebarokahan ilmu. Jadi jangan sampai dengan adanya BOS wali murid tidak mau memberikan andil sebagai mahar ilmu putra-putrinya.

MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat walaupun sudah ada dana BOS, orangtua siswa tetap diminta untuk menyerahkan I'anah berupa gabah. I'anah dimaksudkan sebagai mahar ilmu untuk kebarokahan dengan mengikuti cara bapak Maulanasyaikh pendiri NWDI. I'anah yang dikumpulkan orangtua siswa berupa gabah ini dikelola oleh pengurus yayasan bukan oleh pengelola masing-masing lembaga. Kemandirian sebuah lembaga pendidikan berdasarkan penelitian Sukarti dan Wibowo (2013, p.273-274) meliputi aspek pengelolaan lembaga, pengelolaan program dan pengelolaan keuangan ketiga aspek ini menentukan bagaimana kemandirian sebuah lembaga termasuk MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat. Keadaan ini dijelaskan oleh Kepala madrasah bahwa:

Upaya pembiayaan yang ada di Madrasah ini ialah pertama ada koperasi yang dikelola oleh yayasan yang menjual ATK dan sejenisnya, yang kedua dari I'anah. I'anah itu istilahnya sumbangan orangtua wali murid pertahun dalam bentuk gabah.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk itulah dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan, seperti di MTs Al-Ittihadiyah ada Koperasi yang dikelola yayasan. Ketika biaya operasional yang berasal dari pemerintah belum terealisasi, MTs Al-Ittihadiyah dapat menggunakan dana koperasi terlebih dahulu atau meminjam kebutuhan-kebutuhan operasional sekolah di koperasi. Koperasi di sekolah dapat dirasakan perannya secara ekonomi dan memperlancar kebutuhan proses pembelajaran (Lindawati & Suyanto, 2015, p. 178). Selain itu MTs Al-Ittihadiyah seharusnya bisa memaksimalkan pendapatan pendanaan yang berasal dari masyarakat berupa I'anah yang dikeluarkan setiap panen raya. Sebagaimana hasil penelitian Zulfa (2013, p. 22) bahwa praktek pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat dilakukan berbasis pada umat berupa zakat, infaq, sadakah, dan wakaf yang dilakukan secara akuntabel dan transparan. Madrasah harus kreatif mencari sumber pembiayaan pendidikan yang mencukupi kebutuhan madrasah. Dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada siswa. Hal ini dapat ditunjang dengan usaha mandiri madrasah sebagaimana hasil penelitian Hafidh dan Badarudin (2018, p. 266) bahwa dengan adanya usaha mandiri yang dijalankan oleh lembaga pendidikan membuat tidak sepenuhnya bergantung pada pendanaan dari pemerintah dan masyarakat. Namun keadaan madrasah berbeda setelah adanya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang informan bahwa:

Setelah ada BOS ini terarah penggunaan keuangan kalau dulu sebelum ada BOS juga nyaman-nyaman saja artinya bisa kita ambil SPP dari masyarakat. Kalau setelah ada BOS ini kan terarah kemudian harus kita habiskan penggunaannya dengan anggaran RAB yang kita buat, kalau SPP dulu kan mana yang lebih dominan yang harus dikerjakan itu yang dikerjakan harus ngirit dikitlah.

Adanya dana BOS memberikan keleluasaan bagi pengelola Madrasah dalam menggunakan anggaran. Sebelum ada BOS, pengelola Madrasah berusaha sehemat mungkin dalam menggunakan barang atau jasa, sedangkan setelah ada BOS tampaknya itu berubah di mana seakan-akan dana BOS harus dihabiskan sesuai anggaran yang sudah dibuat. Hal ini berbeda dengan aturan dalam mekanisme pengambilan dana BOS bahwa penyaluran dana BOS yang dilakukan secara bertahap (tiga bulanan), bukan berarti harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana BOS tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan madrasah/PPS sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah, serta bilamana terdapat sisa dana di madrasah dan Bunga Bank/ Jasa Giro maka dana tersebut tetap milik madrasah untuk digunakan bagi kepentingan madrasah (Dit.Pi Kementerian Agama, 2015, p.14). Penafsiran tentang penggunaan alokasi dana BOS yang tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam Juknis, tidak lepas dari tidak berhasilnya sosialisasi yang baik tentang BOS ke madrasah-madrasah. Biasanya sosialisasi ditingkat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah ke beberapa sampel saja, tidak ke seluruh madrasah yang berada di bawah naungannya sebagaimana hasil wawancara dengan Tim manajemen BOS Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah bahwa:

Setelah realisasi dana kita ambil 1 (satu) minggu, kita buat tim Monev yang terdiri dari semua pengawas, kita libatkan juga semua seksi karena keterbatasan jumlah pengawas, yang anggota timnya masing-masing 5 (lima) orang dan itupun kita tidak bias Monev kesemua lembaga kita ambil sampel saja.

Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk menuntaskan pemenuhan wajar dikdas. Pada beberapa kebijakan, tujuan subsidi pendidikan diarahkan hanya untuk meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh warga masyarakat, atau peserta didik dan mengafirmasi pembebasan pungutan bagi siswa yang berasal dari rumah tangga miskin (Saharudin, 2011, pp. 21-22). Saat ini dana BOS merupakan sumber pembiayaan biaya operasi non personalia yang utama tidak ada usaha lain atau inovasi dalam mendapatkan sumber pendanaan operasional sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan yang lain bahwa:

Untuk operasional di Madrasah ini hanya dari BOS tidak ada sumber yang lain, di sini tidak pernah ada tanah yang digarap sama orang, kemudian hasilnya digunakan untuk operasional selama saya di sini tidak pernah saya dengar ada sumber dana lain selain BOS. Hanya BOS itu sudah kita pake untuk apa-apa

Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat tidak memiliki sumber biaya operasional lain selain BOS. Karena dengan adanya BOS masyarakat menganggap tidak perlu lagi ada tambahan biaya operasional ke Madrasah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan kemandirian madrasah dengan adanya BOS di mana berdasarkan hasil penelitian Sari & Sukirno (2017, p. 37). Dijelaskan kebutuhan akan kreativitas, kemandirian keberanian mengambil resiko sangat dibutuhkan. Kreativitas sekolah sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kemandirian di sekolah. Kemandirian sekolah ditunjukkan dengan memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada orang lain untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumberdaya yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Pengelolaan sekolah secara mandiri dan dibawah kebijakan sendiri sangat penting terutama dalam hal pendanaan pendidikan di sekolah. Hal ini tentunya dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian Rudi & Haikal

(2014, p.42) melalui kerjasama yang dibangun atas dasar komunikasi, keterlibatan dan koordinasi semua warga sekolah termasuk pengelola yayasan, kepala madrasah, guru, dan masyarakat.

SIMPULAN

Dampak Bantuan Operasional Sekolah terhadap Tantangan Kemandirian MTs Nurul Yaqin Praya dan MTs Al-Ittihadiyah NW Sepakat Lombok Tengah adalah pada awal berdirinya madrasah, pendiri yayasan dengan masyarakat bersama-sama membangun, walaupun pada saat itu kondisi ekonomi masyarakat sangat kekurangan. Operasional madrasah berasal dari swadaya masyarakat segala kebutuhan madrasah ditanggulangi bersama. Namun hal berbeda terjadi ketika ada kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan adanya BOS masyarakat menganggap tidak perlu lagi ada tambahan biaya operasional ke Madrasah. Sosialisasi penggunaan BOS belum maksimal sehingga mengakibatkan masyarakat salah tafsir. Pada saat ini BOS dijadikan sumber utama pemenuhan biaya operasi nonpersonalia madrasah, tidak ada kreativitas dari pengelola madrasah dalam mendapatkan tambahan biaya operasi nonpersonalia. Oleh karena itu madrasah sangat tergantung dengan dana BOS karena untuk pemenuhan biaya nonpersonalia hanya mengandalkan BOS.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B., & Hurriyati, R. (2008). *Manajemen corporate dan strategi pemasaran jasa pendidikan fokus pada mutu dan layanan prima*. Bandung: Alfabeta
- Bhawa, G. A. S, Haris, I. A., & Made Artana, M. P. (2014) Efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(1). doi:<http://dx.doi.org/10.23887/jjpe.v4i1.4118>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian kualitatif & desain riset memilih di antara lima pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 565-578.
- Hafidh, Z., & Badrudin, B. (2018). Pesantren kemandirian perekonomian: Studi tentang kewirausahaan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 257-267. doi:<https://doi.org/10.14421/manageria.2018.32-03>
- Ismanto, B. (2014). *Public participation in budgeting management school in salatiga of central java province, Indonesia*. Proceedings Book of ICESTSR 2014, Malaysia.
- Jack, H (2015). Optimalisasi anggaran pendapatan dan biaya sekolah: Kajian di Sekolah Kota Banda Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 9(2), 83-93. doi:<https://doi.org/10.13170/jp.9.2.2878>
- Kharisma, B. (2013). Dampak program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap tingkat putus sekolah di Indonesia: Analisis DID. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1), 7-15.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2015). *Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Pondok Pesantren Salafiyah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Operasi Nonpersonalia*.
- Lindawati, M. L., & Suyanto, S. (2015). Peran Koperasi Sekolah dalam meningkatkan sikap kewirausahaan siswa SMK Negeri 1Wonogiri. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 2(2), 170-180. doi:<https://doi.org/10.21831/hsjpi.v2i2.7668>

- Muhammadi, N., Cairil, S., & Yahya, M. (2015). The madrasah leadership, teacher performance and learning culture to improve quality at Madrasah Tsanawiyah Negeri Jakarta. *Journal of Management and Sustainability*, 5(2), 129-145. doi:<https://doi.org/10.5539/jms.v5n2p129>
- Mitchell, D. E., Crowson R. L., & Shipps, D. (2011). *Shaping education policy power and process*. New York: Routledge.
- Novelsyah, M., & Sudibyoy, Y. A. (2011). *Penatausahaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah*. Yogyakarta: Lembah Manah.
- Nata, A. (2013). *Kapita selekta pendidikan Islam isu-isu kontemporer tentang pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). *How management and funding relate*. doi:<https://doi.org/10.1787/9789264175006-en>
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun Anggaran 2015*.
- Presiden Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Purnama, B. J. (2016). Optimalisasi manajemen Sumber Daya Manusia dalam upaya peningkatan mutu sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 27-36.
- Purwanti, S. (2013). Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan disiplin kerja guru dan pegawai di SMA Bakti Sejahtera Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Journal Administrasi Negara*, 1(1), 210-224.
- Putra, G. R. N. (2016). *Politik pendidikan liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rubin, A., & Babbie, E. (2009). *Essential research methods for social work*. USA: Brooks/Cole.
- Rahayu, S., Ludigdo, U., Irianto, G., & Nurkholis, N. (2015). Budgeting of School Operational Assistance Fund based on the value of gotong royong. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, 364–369. doi:<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.047>
- Rosyada, D. (2017). *Madrasah dan profesionalisme guru dalam arus dinamika pendidikan di era otonomi daerah*. Depok: Kencana.
- Sulfiati, F., Alam, A. S., & Irwan, A. L. (2010). Akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai. *None*, 3(2), 113-122.
- Saharudin, I. (2011). Bantuan Operasional Sekolah: Konsistensi mandat, keberlanjutan, dan akuntabilitas. Retrieved from www.pattiro.org
- Saptari, Y. U. (2015). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Unpublished doctoral dissertation), Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah.
- Sari, S., & Sukirno, S. (2017). Peningkatan intensi berwirausaha siswa Sekolah Menengah Kejuruan. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 29-38. doi:<https://doi.org/10.21831/hsjpi.v4i1.9744>

- Setiyati, S. (2014). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi Kerja, dan budaya sekolah terhadap kinerja guru. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 22(2), 200-206. doi:<https://doi.org/10.21831/jptk.v22i2.8931>
- Suhardi, D., & Hadiyanto, H. (2012). *Perjalanan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005-2012 mencegah drop out, meningkatkan kualitas pendidikan dasar*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Sukarti, S., & Wibowo, U. B. (2013). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 1(2), 269-284. doi:<https://doi.org/10.21831/amp.v1i2.2399>
- Sulisworo, D. (2016). The contribution of the education system quality to improve the nation's competitiveness of Indonesia. *Journal of Education and Learning*, 10(2), 127-138.
- Supriyadi, U. D. (2016). Pelaksanaan BOS dan minat masyarakat mengikuti pendidikan dasar gratis. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1), 79-85. doi:<https://dx.doi.org/10.17977/jip.v17i1.2623>
- Yuliana, R., Widayati, W., & Taufiq, A. (2015). Evaluasi pelaksanaan kebijakan gratis pada jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal of Politic and Government Studies*, 4(3), 261-270.
- Yi, P. (2015). Do school accountability and autonomy affect pisa achievement? Evidence from South Korea. *KEDI Journal of Education Policy*, 12(2), 197-223.
- Yudhanti, R. (2012). Kebijakan hukum pemenuhan hak konstitusional warga atas pendidikan dasar. *Pandecta: Research Law Journal*, 7(1). doi:<https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2360>
- Zulfa, U. (2013). Membangun Madrasah bermutu melalui praktik manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat (Sebuah alternatif model pembiayaan pendidikan di Indonesia). *Jurnal kependidikan*, 1(1), 12-23. doi:<https://doi.org/10.24090/jk.v1i1.529>
- Widyatmoko, S., & Suyatmini, S. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemasan I Surakarta. *Manajemen Pendidikan*, 12(3), 153-160. doi:<https://doi.org/10.23917/jmp.v12i3.5528>